



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan percepatan akses keuangan di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Pengarah mempunyai tugas untuk menetapkan arah kebijakan percepatan akses keuangan daerah;
- b. Koordinator mempunyai tugas:
 1. menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka pengambilan keputusan mengenai percepatan akses keuangan di Kabupaten Bantul; dan
 2. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di Kabupaten Bantul dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan di Kabupaten Bantul berdasarkan arahan dari Pengarah dalam rangka menindaklanjuti rapat Tim.

- c. Sekretaris dan Anggota Sekretariat mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan dalam rangka pengambilan keputusan Tim;
- d. Anggota mempunyai tugas:
 - 1. melakukan identifikasi kebutuhan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Bantul;
 - 2. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja tahunan percepatan akses keuangan di Kabupaten Bantul;
 - 3. melakukan fasilitasi dan inisiasi program percepatan akses keuangan di Kabupaten Bantul dengan cara:
 - a) mempertemukan para pihak yang terkait dengan program dan kegiatan; dan
 - b) melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait.
 - 4. melakukan sosialisasi dan publikasi program percepatan akses keuangan di Kabupaten Bantul kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait;
 - 5. melakukan pemantauan perkembangan, evaluasi, dan identifikasi permasalahan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Bantul;
 - 6. merumuskan rekomendasi kebijakan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Bantul;
 - 7. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di Kabupaten Bantul;
 - 8. melakukan pertemuan koordinasi dalam bentuk Rapat Pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan Rapat Koordinasi Teknis paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
 - 9. menyusun laporan rencana dan perkembangan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah secara triwulanan melalui Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;

10.menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati Bantul yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan; dan

11.menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Cq. Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Setda. Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
AKSES KEUANGAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	1. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul 2. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta
5.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
		<p>5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>16. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</p> <p>17. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta</p> <p>18. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul</p> <p>19. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Bantul</p> <p>20. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
6.	Sekretariat	<div>21. Unsur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>22. Unsur Himpunan Bank-Bank Milik Negara di Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>23. Unsur Asosiasi Bank Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>24. Unsur Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia di Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>25. Unsur Asosiasi Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> <div>26. Unsur Asosiasi Asuransi Umum Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk</div> <div>27. Unsur Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk</div> <div>28. Unsur Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk</div> <div>1. Unsur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk</div> <div>2. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH